

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN GAYO LUES

Maharami¹, Edy Putra Kelana², Faizal Madya³

¹Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Terbuka, ²Universitas
Al-Muslim, ³Universitas Terbuka

aura.mirw4libn4@gmail.com, kelana.edyputra@yahoo.com, faizal@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Merille S. Grindle. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues belum berjalan optimal. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Adapun faktor pendukungnya yaitu kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan merupakan kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi, tipe manfaat yang dihasilkan memiliki efek berganda sehingga ruanglingkupnya dapat dirasakan berbagai kalangan, karakteristik lembaga penguasa yang tetap menjalankan program kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ada, kepatuhan dan daya tanggap para implementor sangat baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu derajat perubahan yang diharapkan pada kebijakan pengembangan pariwisata ini bukanlah derajat perubahan yang dapat diraih dalam waktu singkat, letak pengambil keputusan dengan implementor dan target kebijakan relatif jauh sehingga implementasi tidak berjalan optimal, pelaksana Program kebijakan pengembangan pariwisata ada yang berlatar belakang pendidikan pariwisata, sumber daya yang dilibatkan berupa sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya teknologi dan sumber daya finansial di Kabupaten Gayo Lues sangat minim, aktor terlibat tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam membuat strategi pengembangan pariwisata.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Objek Wisata, Pengembangan Pariwisata

ABSTRACT

This research aims to analyze how tourism policy is implemented in Gayo Lues Regency and what factors influence the implementation of tourism policy. This research uses a qualitative descriptive research approach with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation studies. The research was conducted referring to Merille S. Grindle's policy implementation theory. The results of the research conducted show that the implementation of tourism development policies in Gayo Lues Regency has not been optimal. There are several supporting and inhibiting factors for policy implementation. The supporting factors are that the interests affected by the policy are shared interests, not personal interests, the type of benefit produced has multiple effects so that its scope can be felt by various groups, the characteristics of the governing body which continues to carry out activity programs in accordance with existing policies, the compliance and responsiveness of the implementers. Very good. Meanwhile, the inhibiting factors are that the degree of change expected in tourism development policy is not the degree of change that can be achieved in a short time, the location of decision makers and policy implementers and targets is relatively far so that implementation

does not run optimally, there are implementers of tourism development policy programs who have tourism education backgrounds. , the resources involved in the form of human resources, physical resources, technological resources and financial resources in Gayo Lues Regency are very minimal, the actors involved do not have a high commitment in making tourism development strategies.

Keywords: Policy Implementation, Tourist Attractions, Tourism Development

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan sektor andalan yang menjadi sumber devisa di Indonesia selain minyak dan gas. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya membuka peluang kerja tapi juga mengurangi angka pengangguran. Hal ini menyebabkan efek berantai yang cukup besar sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kepariwisataan memiliki arti yang sangat luas bukan hanya sekedar bepergian saja, namun juga berkaitan dengan obyek dan daya tarik wisata yang dikunjungi, sarana transportasi yang digunakan, pelayanan, akomodasi, restoran dan rumah makan, hiburan, interaksi sosial antara wisatawan dengan penduduk setempat serta usaha pariwisata. Karena itu pariwisata dapat dipandang sebagai suatu lembaga dengan jutaan interaksi, kebudayaan dengan sejarahnya, kumpulan pengetahuan, dan jutaan orang yang merasa dirinya sebagai bagian dari kelembagaan ini (Purwowibowo, 2012), sehingga pariwisata sebagai konsep dapat dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda.

Pariwisata tidak dapat berdiri sendiri. Pelibatan berbagai sektor sangat penting dalam memajukan pariwisata, untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan yang tepat sebagai naungan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Kebijakan tersebut harus mampu diimplementasikan dengan baik guna memaksimalkan potensi yang ada dan menghindari pembangunan pariwisata yang tidak terencana serta meminimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat aktivitas pariwisata. Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini berada di wilayah tengah dengan ketinggian 1000-3000 meter di atas permukaan laut dengan bentang lahan yang variatif dan berbukit-bukit sehingga dijuluki Negeri Seribu Bukit. Kabupaten Gayo Lues memiliki luas 5.549,91 km² namun lebih dari tujuh puluh persen wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Gunung Leuser. Hal ini berdampak pada pemanfaatan lahan untuk pertanian, pemukiman dan industri menjadi terbatas. Di sisi lain, luasnya hutan lindung dan kawasan nasional ini memberikan keuntungan tersendiri bagi sektor wisata. Keindahan alam yang masih alami, sumber air yang berlimpah dan jalur tracking yang menantang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah yang giat mengembangkan potensi wilayahnya untuk tujuan wisata dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Obyek

dan daya tarik wisata (ODTW) yang dimiliki Kabupaten Gayo Lues cukup banyak dan bervariasi, mulai dari ODTW pegunungan, danau, agrowisata, budaya daerah, hutan, sampai ODTW minat khusus.

Dari seluruh objek daya tarik wisata yang terdapat di Gayo Lues yang paling banyak mendapat kunjungan wisatawan nusantara adalah Kampung Agusen, Kampung Penosan Sepakat, Kolam Biru Rerebe, Kala Pinang, Taman Mini Gayo Indah dan Genting. Sementara yang paling banyak mendapat kunjungan wisatawan mancanegara yaitu Taman Nasional Gunung Leuser melalui pintu masuk Kedah. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2016 telah mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai kepariwisataan yaitu Qanun Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah (perda) yang merupakan kekhususan bagi masyarakat Aceh. Melalui UU Nomor 11 Tahun 2006, masyarakat Aceh diberi kewenangan untuk membentuk peraturan daerah yang bersumber pada nilai-nilai agama dan disebut dengan qanun. Sejak disahkan, Qanun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Gayo Lues. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gayo Lues yang masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten sekitar yang memiliki potensi wisata serupa.

Tabel 1
Jumlah Kunjungan wisatawan

Kabupaten	2017		2018		2019		2020		2021	
	Wisman	Wisnus								
Gayo Lues	255	6954	60	11384	263	17383	23	11535	11	11725
Aceh Tenggara	4979	20865	5715	22838	5625	21388	675	3402	717	10762
Bener Meriah	400	147527	483	62526	295	70928	73	31143	-	51219
Aceh Tengah	682	38669	931	71762	424	52946	335	42796	28	47517

Sumber: Subbag Program, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara ke Kabupaten Gayo Lues masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Ketiga Kabupaten tersebut memiliki potensi alam yang serupa dengan Kabupaten Gayo Lues sehingga sudah sewajarnya menjadi perbandingan dalam pengembangan pariwisata. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gayo Lues dari sektor pariwisata juga sangat kecil, tidak mencapai 5% dari total seluruh PAD di Kabupaten Gayo Lues. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
PAD Kabupaten Gayo Lues dari Sektor Pariwisata

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
PAD Sektor Pariwisata	2.733.129.648,84	4.028.115.390,00	2.373.975.278,00	1.879.027.056,00	1.847.013.225,00
Total PAD Gayo Lues	48.758.464.134,18	51.415.803.751,47	58.402.728.094,40	63.647.025.986,24	62.981.074.919,37

Sumber: Pariwisata, Database Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, 2022

Pembangunan sarana prasarana pariwisata yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gayo Lues cukup masif. Sejak tahun 2018, Pemerintah telah membangun musholla, toilet, gazebo, wisma, jalan setapak, menara pandang, kolam pemandian, dan sarana permainan di objek-objek wisata, namun sebagian besar sarana prasarana ini tidak berfungsi secara optimal. Bahkan diantara sarana prasarana tersebut ada yang belum pernah digunakan sama sekali hingga akhirnya terbengkalai. Pengembangan pariwisata membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM di Kabupaten Gayo Lues menjadi salah satu kendala dalam memajukan pariwisata. Menurut data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, di Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues tidak ada satupun ASN yang berlatar belakang pendidikan pariwisata. Selain itu, Kabupaten Gayo Lues juga kekurangan tenaga profesional yang memiliki lisensi dibidang pariwisata seperti pemandu wisata, petugas hotel, koki, pelayan restoran, dan lain-lain. Dari seluruh pemandu wisata di Kabupaten Gayo Lues hanya ada dua orang yang memiliki lisensi resmi dari pemerintah.

Mr. Jali, salah seorang pemandu wisata senior di Kabupaten Gayo Lues, menyebutkan bahwa Kabupaten Gayo Lues telah dikunjungi oleh wisatawan mancanegara sejak tahun 1980-an yang datang untuk mendaki ke puncak Gunung Leuser. Namun, setelah empat puluh tahun sejak tahun 1980-an hingga saat ini, belum terjadi peningkatan yang berarti baik dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, sarana prasarana pendukung bagi wisatawan di jalur pendakian Gunung Leuser, maupun tenaga profesional di bidang pariwisata. Di sisi lain, pemerintah daerah terus membangun fasilitas dan sarana pariwisata seperti wisma, toilet dan musholla di berbagai objek wisata lainnya meskipun objek wisata tersebut minim pengunjung. Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues telah membuat kebijakan mengenai kepariwisataan dan melaksanakan program kegiatan pengembangan pariwisata. Kebijakan ini didukung dengan potensi daya tarik wisata yang sangat besar namun hingga saat ini masih belum mampu bersaing dalam meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah. Selain itu minimnya kualitas dan kuantitas SDM di sektor pariwisata serta belum tepat dan terarahnya pembangunan sarana prasarana wisata menjadi indikasi terjadinya permasalahan dalam proses implementasi kebijakan yang perlu dianalisis lebih mendalam.

Mengingat unsur yang berkaitan dengan pariwisata demikian banyak, sedangkan Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues merupakan organisasi formal yang memiliki fungsi penyelenggaraan pembinaan teknis operasional bidang kebudayaan dan kepariwisataan meliputi kesenian, kebudayaan, kepariwisataan dan promosi maka penelitian tesis ini diarahkan untuk dapat menjawab mengenai bagaimana implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues serta faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata.

Teori yang tepat dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan kepariwisataan di Kabupaten Gayo Lues sebagai landasan berfikir yang dapat memberikan pondasi dan pedoman yang bersifat teoritis. Untuk itu landasan teori yang ada relevannya dengan masalah merupakan hal yang pokok untuk mempertemukan jalan terbaik dalam memecahkan masalah. Pendapat beberapa ahli yang membahas kebijakan beserta unsur-unsurnya dan pariwisata dengan berbagai komponen yang memperluas bahasan dapat dijadikan pegangan bagi pemecahan masalah.

Banyak sekali definisi yang menjelaskan apa arti kebijakan. Para ahli kebijakan mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda, seperti menurut Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “what ever government choose to do or not to do”, artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Suwitri et al., 2020, pp. 1–7). Pemerintah memegang peranan penting bukannya melakukan tindakan tertentu juga untuk berbuat sesuatu atau menetapkan kebijakan untuk melaksanakan program sesuatu dalam mengatasi permasalahan, akan tetapi pemerintah hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan kegiatan apa-apa, itupun dapat dikatakan kebijakan pemerintah yang demikian bentuknya.

Menurut Friedrich (Widodo, 2021, p. 13) kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Definisi ini berarti pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan apapun bentuknya untuk merespon dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi, dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta menerima masukan atau usulan dari seseorang/ kelompok, sehingga ada jalan keluar yang terbaik, dihasilkan melalui proses yang fair.

Dengan dasar demikian berarti kebijakan mengenai pariwisata termasuk

kebijakan publik yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dari pemerintah sektor pariwisata, serta pemerintah mempunyai kewenangan untuk memaksa agar kebijakan pariwisata ditaati oleh masyarakat atau pihak lain yang bergerak dalam aktivitas kepariwisataan. Dalam realisasinya kebijakan publik perlu dianalisa secara cermat agar diketahui sampai berapa jauh memberikan mudharat bagi publik. Pentahapan proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan yang tersusun, sebagaimana menurut James Anderson (Subarsono, 2012, p. 19) yaitu tahapan formulasi masalah, tahapan formulasi kebijakan, tahapan adopsi kebijakan, tahapan implementasi kebijakan, serta tahapan penilaian (evaluasi) kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan lebih lanjut dari formulasi kebijakan. Tahap formulasi menerapkan strategi dan tujuan kebijakan sedangkan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dilaksanakan pada tahap implementasi kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan memuat serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga bersifat interaktif.

Merilee S Grindle membuat suatu pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikenal dengan "*implementation as a political and administrative process*". Grindle (Riant, 2006) menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan diukur dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan Merille Grindle dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari dua hal yakni: (1) Dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan menunjuk pada aksi kebijakannya; (2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dampaknya pada masyarakat secara individu maupun kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Penelitian Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Gayo Lues ini mengadaptasi pendekatan implementasi kebijakan Merille S Grindle. Grindle menyebutkan bahwa: "*Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect*" (Tachjan, 2006). Sebuah kebijakan perlu dijabarkan kedalam program-program yang tepat untuk pelaksanaan agar implementasi dapat dijalankan. Menurut Grindle (Kasmad, 2013), implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh:

Content/Isi kebijakan yang terdiri dari:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. Suatu kebijakan harus mewakili kepentingan banyak pihak sehingga mendapat dukungan yang maksimal dari unsur-unsur yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan yang hanya didukung oleh sekelompok elemen masyarakat tidak akan dapat berkembang dan terselenggara dengan baik.
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan. Kebijakan akan berhasil menarik dukungan banyak

pihak hanya jika kebijakan tersebut dirasa memberikan banyak manfaat. Kebijakan yang baik akan memberikan tidak hanya satu macam namun berbagai macam manfaat bagi para stakeholder yang terlibat.

- c. Derajat perubahan yang diinginkan. Semakin besar perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan maka akan lebih sulit dalam proses implementasinya dan akan lebih sulit tercapai.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan. Keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kedudukan pembuat kebijakan. Semakin dekat lokasi pembuat kebijakan dari sasaran kebijakan maka akan lebih besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan. Begitu juga sebaliknya, semakin jauh lokasi pembuat kebijakan dari sasaran kebijakan maka lebih kecil peluang keberhasilan.
- e. Pelaksana program. Kebijakan yang tidak didukung oleh pelaksana yang kompeten dan berintegritas tinggi akan sulit meraih keberhasilan.
- f. Sumber Daya yang dikerahkan. Pelaksanaan proses implementasi kebijakan tidak cukup hanya dengan mengandalkan pelaksana program yang baik tapi juga membutuhkan sumber daya yang optimal. Tanpa sumberdaya yang memadai maka suatu proses implementasi tidak akan terselenggara dengan baik bahkan tidak terselenggara sama sekali.

Context/Lingkungan Kebijakan terdiri dari:

- a. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa. Implementasi kebijakan harus mendapatkan dukungan dari lembaga/institusi dan rezim penguasa. Dukungan ini dipengaruhi oleh karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap. Kebijakan yang tepat memiliki tujuan dan bentuk program yang tepat dan sesuai. Para pelaksana dilapangan harus mampu mematuhi kebijakan yang telah diputuskan dan tanggap dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Grindle menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan beragam aktor dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat dilihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan sedangkan proses administratif terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Kelebihan dari model implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Grindle adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bukan saja karakter birokrat sebagai pelaksana, tetapi juga kekuasaan dan kelompok-kelompok kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Secara umum masyarakat menyebut pariwisata atau piknik berarti kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap dapat menyenangkan diri dan keluarganya. Jenis tempat wisata yang dikunjungi tergantung kesukaan orang yang bersangkutan, bisa pemandangan alam, gunung, danau, tempat hiburan, taman ria, museum dan lain-lain. Intinya tempat yang dinilai dapat dinikmati dan menjadikan suasana lain menambah kegairahan hidup. Lebih spesifik pengertian pariwisata menurut ahlinya seperti Hans Buchi (Yoeti, 2014), kepariwisataan adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud tersebut. Menurut Undang Undang No. 9 tahun 1990, menyebutkan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut (pasal 1 ayat (3) UU No. 9/1990). Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata (pasal 1 ayat (4) UU No. 9/1990). Adapun wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata (pasal 1 ayat (1) UU No. 9 /1990). Orang yang melakukan kegiatan wisata disebut wisatawan.

Pengembangan pariwisata membutuhkan peran serta berbagai pihak namun peranan terbesar tetap merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Fennel (2002) menyatakan bahwa environmental governance sebagai sub-category of govenrnance yang dibentuk oleh berbagai model (Avenzora, 2008, p. 283). Diantara model tersebut adalah: a. Regulatory control. Menurut model ini pemerintah mempunyai peran strategis dalam membuat standar-standar dan aturan-aturan yang diperlukan; b. Cooperative management. Menurut model ini pemerintah menerapkan hubungan kolaboratif antara sektoral dalam pemerintahan dan mediasi dengan pihak swasta maupun LSM.

Implementasi kebijakan pariwisata harus melalui beberapa tahapan, yaitu (Diarta, 2020, p. 110): a. Mengevaluasi potensi pasar; b. Pilih lokasi yang cocok; c. Identifikasi pemain kunci (stakeholders); d. Lakukan studi fisibilitas pasar dan keuangan; e. Rencanakan dan buat desain konsep; f. Buat dan dokumentasikan proposal; g. Konsultasikan dengan Masyarakat; h. Ikuti proses perijinan; i. Lengkapi proses investasi; j. Persiapkan dokumentasi bangunan (oleh arsitek); k. Fase konstruksi dan Pembangunan; l. Sediakan rencana operasional

Liu dalam (Diarta, 2020, p. 114) menyebutkan bahwa untuk membangun pariwisata dibutuhkan kerangka implementasi kebijakan yang mencakup minimal empat aspek yaitu: Pembangunan dan pengembangan infrastruktur; aktivitas pemasaran; peningkatan kualitas budaya dan lingkungan; serta pengembangan sumber daya

manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif kualitatif. Hal ini sesuai dengan masalah yang akan dibahas penulis mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues agar tujuan penelitian ini dapat tercapai seperti yang diharapkan. Hardani, et al., (2020, p. 54) menyebutkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono (2018, p. 105) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti akan banyak menjadi instrument karena dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrument kunci. Miles dan Huberman dalam (Hardani et al., 2020, p. 163) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Gayo Lues

Implementasi Kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan membentuk suatu keterkaitan (linkage) antar satu unsur pendukung dengan unsur lainnya. Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, peneliti menggunakan teori implementasi Gridle sebagai berikut:

Content/Isi kebijakan.

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Kepentingan yang terpengaruhi dalam konsep Grindle menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan dapat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Suatu kebijakan publik yang terbentuk berdasarkan kepentingan bersama akan berdampak lebih besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pariwisata sebagai multiplier effect melibatkan berbagai stakeholder dalam proses pengembangannya. Selain Pemerintah, Stakeholder yang terkait erat dalam pembangunan kepariwisataan adalah pengusaha sektor pariwisata seperti pengelola objek wisata, pemilik hotel/restaurant, travel, dan wisatawan. Seluruh Stakeholder yang terlibat harus merasakan urgensi dari kebijakan pengembangan pariwisata yang dibuat oleh pemerintah.

Bersumber pada hasil wawancara dapat dilihat bahwa penyusunan suatu kebijakan pasti dipengaruhi berbagai macam kepentingan namun kebijakan

pengembangan usaha pariwisata dibuat atas dasar kepentingan bersama. Penyusunan kebijakan ini juga dilatarbelakangi potensi pariwisata di Kabupaten Gayo Lues yang sangat dominan sehingga membutuhkan suatu pedoman dalam upaya pengembangannya. Target dan tujuan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues telah selaras antara tujuan yang diharapkan oleh DPRK maupun yang difahami dan dilaksanakan oleh implementor. Studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap produk kebijakan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bahwa Qanun Kabupaten Gayo Lues no 4 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata merupakan tindak lanjut dari Qanun Aceh No 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata dan Undang-Undang no 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata. Qanun ini memiliki tujuan yang besar dan mencakup segala lapisan masyarakat. Oleh Sebab itu kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan ini tidak hanya golongan tertentu tapi semua golongan.

Tipe Manfaat

Teori Grindle menyebutkan bahwa sebuah kebijakan akan dapat berdampak maksimal jika dalam proses implementasi memberikan manfaat bagi banyak pihak. Semakin luas sektor yang menerima manfaat maka semakin besar peluang keberhasilan proses implementasi kebijakan. Analisis manfaat suatu kebijakan pengembangan pariwisata tidak terlepas dari telah terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pengembangan pariwisata pada kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pariwisata yang tidak secara detail memuat ruang lingkup pengembangan pariwisata akan berpeluang gagal diinterpretasikan oleh implementor. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues menurut Bapak H. M. Yusuf HS belumlah mencakup semua kebutuhan pengembangan pariwisata. Menurut beliau, kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues masih membutuhkan kebijakan tambahan salah satunya berupa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB).

Dari hasil wawancara terhadap para informan dapat diketahui bahwa kebijakan pengembangan pariwisata idealnya dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai pihak. Pendapat para informan tersebut sejalan dengan tujuan kebijakan yang tercantum dalam qanun Kepariwisata No 4 Tahun 2016. Apabila tujuan kebijakan tersebut dapat dicapai maka manfaat yang sangat besar akan dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dampak positif dari kebijakan tersebut hanya dapat dirasakan jika kebijakan pengembangan pariwisata telah direalisasikan secara optimal. Kebijakan pengembangan pariwisata yang ada juga belum mencakup semua kebutuhan regulasi pengembangan pariwisata sehingga belum memberikan manfaat sesuai harapan.

Derajat Perubahan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dapat ditinjau melalui seberapa besar perubahan yang diharapkan dan seberapa signifikan perubahan yang terjadi setelah kebijakan pengembangan pariwisata diimplementasikan. Salah satu Indikator keberhasilan kebijakan pengembangan pariwisata yang paling sederhana dapat dilihat dari peningkatan jumlah destinasi pariwisata.

Tabel 31 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tahun	Wisman	Wisnus
2017	155	6954
2018	60	11384
2019	263	17383
2020	23	11535
2021	11	11725
2022	19	19883

Sumber: Pariwisata, Database Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, 2022

Dari wawancara dan data di lapangan dapat diinterpretasikan bahwa terjadi perubahan setelah kebijakan pengembangan pariwisata diimplementasikan berupa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan peningkatan jumlah destinasi wisata. Namun, dalam kurun waktu enam tahun semenjak kebijakan tersebut terbit peningkatan yang terjadi belum signifikan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pandemi COVID-19 maupun belum optimalnya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dilaksanakan. Ditinjau dari isi kebijakan pengembangan pariwisata yang ada, perubahan yang diharapkan sangat besar. Untuk mencapai perubahan tersebut harus melibatkan berbagai sektor dan komitmen yang tinggi dari para implementor, selain itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga dapat disimpulkan bahwa derajat perubahan yang diharapkan sulit dicapai.

Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambil keputusan atau pemangku kebijakan memiliki pengaruh yang penting dalam implementasi kebijakan. Semakin dekat sasaran kebijakan dengan pengambil keputusan maka ruang lingkup sasaran semakin kecil sehingga kebijakan dapat lebih fokus diimplementasikan. Pengaruh letak pengambil keputusan terhadap implementasi kebijakan dapat dilihat dari mekanisme penyusunan kebijakan maupun program, siapa aktor yang berwenang dalam menetapkan kebijakan dan bagaimana pengambil keputusan memutuskan program yang tepat untuk mendukung implementasi kegiatan. Pengaruh letak pengambil keputusan juga dapat dilihat dari sistem koordinasi antar stakeholder dan implementor. Semakin Dekat pengambil keputusan dengan sasaran maka peluang koordinasi yang terjadi akan lebih baik dan intens.

Deduksi dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah bahwa Letak pengambil

keputusan dalam kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Gayo Lues adalah Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pariwisata dengan melibatkan stakeholder di sektor pariwisata. Sementara itu dalam ruang lingkup yang lebih kecil, implementasi program, wewenang dimiliki oleh setiap ASN yang diberikan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan masing-masing. Namun wewenang yang dimiliki ASN hanya terbatas pada teknis implementasi bukan pengambilan keputusan. Hal ini memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues memiliki peluang keberhasilan yang rendah karena ruang lingkup kebijakan yang ada mencakup wilayah Kabupaten Gayo Lues. Untuk memberikan dampak yang optimal maka ruang lingkup kebijakan harus diperkecil lagi dengan membuat turunan dari qanun berupa peraturan desa maupun peraturan khusus di objek wisata.

Pelaksana Program

Pelaksana program merupakan salah satu dimensi yang sangat mempengaruhi optimalitas implementasi kebijakan. Implementor yang ideal adalah yang kompeten dan menguasai tugas pokok serta fungsinya dengan baik. Dalam hal implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, implementor utama adalah Aparatur Sipil Negara di Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues. Implementasi kebijakan dijalankan melalui mekanisme yang wajib tertuang dalam SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP menjadi panduan untuk memastikan kegiatan dijalankan dengan baik dan tepat sasaran. Dinas Pariwisata sebagai implementor utama wajib memiliki SOP untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan dan menjalankannya dengan tepat. SOP merupakan salah satu faktor pendukung yang harus dimiliki oleh implementor namun bukan menjadi jaminan optimalnya proses implementasi. Observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa SOP hanya merupakan dokumentasi yang wajib tersedia namun tidak dilaksanakan baik dari sisi administrasi maupun teknis dilapangan. Hal ini disebabkan karena minimnya tenaga pelaksana di Dinas Pariwisata.

Sumber Daya Yang Dilibatkan

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya yang maksimal. Sumber daya yang dibutuhkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fisik (sarana/prasarana) dan sumber daya teknologi. Berdasarkan observasi pada objek wisata di Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat bahwa sumber daya manusia di sektor pariwisata belum memadai. Objek-objek wisata milik pemerintah maupun sektor swasta masih dikelola secara konvensional dan belum memenuhi standar yang harus dimiliki oleh objek wisata. Upaya untuk mengatasi minimnya SDM ini idealnya rutin dilakukan dan didukung oleh semua pihak. Namun, fakta yang ditemukan saat observasi menggambarkan bahwa pembinaan dan pelatihan jarang dilakukan oleh pemerintah terutama sejak Pandemi COVID-19. Pelatihan pengembangan SDM pariwisata yang dilakukan sejak tahun 2020 hanya sekali yaitu pada tahun 2023 berupa pelatihan

pembuatan konten promosi pariwisata yang melibatkan 40 orang peserta. Pelatihan tersebut tentu saja belum memadai karena sektor pariwisata memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan membutuhkan pembinaan secara menyeluruh.

Sumber daya fisik berupa sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa masih banyak objek wisata yang tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti toilet ataupun musholla, bahkan beberapa objek wisata hanya dapat dikunjungi dengan melalui jalan setapak. Minimnya sumber daya fisik tidak hanya terjadi di objek-objek wisata. Berdasarkan observasi di Dinas Pariwisata ditemukan bahwa fasilitas penunjang kegiatan seperti laptop, printer, dan lain-lain juga sangat tidak proporsional.

Minimnya sumber daya manusia maupun sumber daya fisik di Kabupaten Gayo Lues ternyata tidak dapat dibantu dengan sumber daya teknologi. Di era teknologi industri 5.0, pemanfaatan teknologi digital memegang peranan sangat penting. Melalui observasi ditemukan bahwa teknologi digital belum dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues. Sistem operasional di objek-objek wisata masih dilakukan secara manual. Di Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues, hanya beberapa kegiatan yang didukung aplikasi. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi wajib untuk menunjang transparansi dan komunikasi data secara menyeluruh secara nasional. Sedangkan aplikasi khusus pariwisata Kabupaten Gayo Lues belum ada sama sekali. Upaya promosi pariwisata yang dilakukan juga belum memanfaatkan website resmi melainkan hanya memanfaatkan media sosial berupa facebook dan instagram yang belum dikelola secara profesional.

Sebanding dengan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Fisik, Sumber Daya Finansial memiliki peranan yang cukup krusial dalam implementasi kebijakan. Apabila sumber daya finansial terpenuhi maka seluruh kekurangan pada sumber daya lainnya akan dapat diperbaiki dengan mudah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, para informan menyebutkan kendala minimnya anggaran dalam pengembangan pariwisata merupakan alasan terbesar tidak terselenggaranya implementasi kebijakan secara optimal.

Context Implementasi

Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Terlibat

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata membutuhkan kekuasaan agar strategi dapat dilaksanakan oleh seluruh implementor secara tepat dan terarah demi kepentingan publik. Kekuasaan tertinggi dalam implementasi kebijakan dimiliki oleh Kepala Daerah dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait yaitu Dinas Pariwisata. Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Pariwisata harus selaras dengan program pemerintah daerah dan visi misi kepala daerah. Keberhasilan strategi yang direncanakan bergantung

pada kerjasama dan koordinasi yang baik antar semua stakeholder. Kepala Bagian Perekonomian Bappeda Gayo Lues, Ibu Zaimah, sebagai satu pejabat yang bertugas mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata memberikan pernyataan serupa bahwa PKA (Pekan Kebudayaan Aceh) adalah salah satu program prioritas di tahun 2023 karena memunculkan banyak budaya yang dapat dipromosikan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa strategi para implementor telah sejalan. Hal ini dapat dimaknai bahwa koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah tidak mengalami hambatan. Strategi pengembangan pariwisata idealnya telah tertuang dalam satu peraturan daerah yang secara khusus memuat strategi pengembangan pariwisata dan disebut dengan RIPPARKAB atau Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten. Belum adanya Peraturan Daerah RIPPARKAB tentu saja menjadi sebuah kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Strategi pengembangan pariwisata yang dibuat tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga dapat berubah sesuai dengan minat pemegang kekuasaan. Laporan rencana induk pariwisata yang telah dibuat selama beberapa tahun namun tak kunjung di sahkan mengindikasikan kurangnya komitmen para aktor untuk mengembangkan pariwisata.

Karakteristik Lembaga Penguasa

Teori Grindle menyebutkan bahwa karakteristik lembaga penguasa di suatu wilayah dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Kebijakan pengembangan pariwisata saat ini di Kabupaten Gayo Lues berpedoman pada qanun kepariwisataan no 4 tahun 2016. Sejak qanun ini disahkan telah terjadi 3 kali pergantian kepala daerah yaitu 1 kali pergantian bupati definitif dan dua kali pergantian penjabat bupati. Pada satuan kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Gayo Lues juga telah mengalami dua kali pergantian kepala dinas. Sedangkan untuk DPRK juga telah mengalami satu kali perubahan anggota komisi yang membidangi kepariwisataan. Dari hasil analisis wawancara dan data-data yang didapat di lapangan dapat dilihat bahwa adanya pengaruh kepala daerah maupun Kepala Dinas Pariwisata pada penentuan prioritas program kegiatan namun tidak terlalu signifikan. Dismilaritas yang ada ditafsirkan secara bervariasi oleh masing-masing informan. Namun perbedaan tersebut masih sejalan dengan kebijakan pengembangan pariwisata yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga penguasa di Kabupaten Gayo Lues memiliki karakteristik yang tidak mementingkan kepentingan pribadi terhadap program kegiatan.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap para implementor merupakan elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, para informan menyebutkan bahwa belum ditemukan pelanggaran terhadap kebijakan yang telah dibuat. Namun para informan juga menyebutkan bahwa Dinas Pariwisata

Kabupaten Gayo Lues sebagai implementor utama belum melakukan implementasi kebijakan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa para implementor sangat patuh namun belum tanggap melakukan implementasi disebabkan oleh berbagai faktor.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Gayo Lues

Faktor Pendukung

Content Implementasi:

Keentingan yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues dibuat dengan berlandaskan kepentingan bersama. Para stakeholder memiliki pemikiran dan keyakinan yang sama bahwa kebijakan dibuat untuk memajukan sektor pariwisata Kabupaten Gayo Lues. Keyakinan dan dukungan dari implementor dan stakeholder tentu saja menjadi dasar untuk suksesnya implementasi kebijakan.

Tipe Manfaat

Penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa seluruh informan memberikan pendapat yang sama mengenai manfaat kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues. Mereka menyebutkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues memberikan manfaat yang sangat besar dan memiliki efek berganda sehingga ruanglingkupnya dapat dirasakan berbagai kalangan.

Context Implementasi

Karakteristik Lembaga Penguasa

Informan yang diwawancarai memberikan pendapat yang sedikit berbeda mengenai pengaruh para pimpinan terhadap implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues. Namun, setelah peneliti melakukan triangulasi sumber maka dapat diketahui bahwa para implementor dan pemangku kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues menjalankan program kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ada. Perbedaan prioritas program kegiatan pada setiap pergantian pimpinan tidak signifikan dan tidak bertentangan dengan kebijakan dan bukan berdasarkan atensi pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga yang berkuasa memiliki integritas sehingga merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Pernyataan para informan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sejak qanun kepariwisataan ditetapkan hingga kini belum pernah terjadi pelanggaran terhadap kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa para implementor telah mematuhi kebijakan ini secara bersungguh-sungguh. Kebijakan

pengembangan pariwisata juga mewajibkan para implementor untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Perintah untuk monitoring dan evaluasi ini juga dipatuhi oleh seluruh instansi terkait dan dilakukan secara berkala.

Faktor Penghambat

Content Implementasi

Derajat Perubahan

Derajat perubahan yang diharapkan pada kebijakan pengembangan pariwisata ini bukanlah derajat perubahan yang dapat diraih dalam waktu singkat. Pariwisata sebagai sektor yang memiliki dampak berganda membutuhkan komitmen dan antusiasme yang tinggi dari semua implementor. Oleh sebab itu, derajat perubahan ini menjadi penghambat implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues dan memerlukan kebijakan turunan yang bersifat lebih teknis sehingga derajat perubahan lebih mudah terealisasi.

Letak Pengambil Keputusan

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues di buat berupa qanun/peraturan daerah sehingga ruang lingkup peraturan ini sangat luas dan tidak spesifik. Peraturan daerah ini ditujukan untuk seluruh objek wisata yang ada yang tentu saja memiliki karakteristik berbeda. Jarak antara pembuat kebijakan terhadap implementor dan target kebijakan relatif jauh sehingga implementasi tidak berjalan optimal. Hal ini menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.

Pelaksana Program

Pelaksana program kebijakan pengembangan pariwisata idealnya memiliki integritas dan kompetensi yang mendukung. Dinas Pariwisata sebagai implementor utama hingga saat ini tidak memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlatar belakang pendidikan pariwisata. Dinas Pariwisata juga belum bekerjasama dengan tenaga ahli dalam pengembangan pariwisata. Hal ini tentu saja menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.

Sumber Daya Yang Dilibatkan

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata membutuhkan sumber daya yang besar. Namun, Belum ada satupun sumber daya yang terpenuhi. Sumber daya yang tersedia berupa sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya teknologi dan sumber daya finansial di Kabupaten Gayo Lues sangat minim. Hal ini menjadi hambatan yang sangat besar dan berdampak pada dimensi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang lainnya.

Context Implementasi

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Terlibat

Aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues telah terintegrasi dengan baik. Namun, integrasi yang terjalin tidak memberikan hasil optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya strategi pengembangan pariwisata yang baku berupa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB). Laporan Rencana Induk Pariwisata yang telah dibuat pada tahun 2018 belum juga dibuat menjadi peraturan daerah. Tidak adanya RIPPARKAB menjadi kendala yang serius dalam pengembangan pariwisata dan menunjukkan rendahnya komitmen aktor terlibat untuk memajukan sektor pariwisata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan belum berhasil. Banyak faktor yang menjadi penghambat proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata ini. Adapun faktor yang mendukung implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten Gayo Lues yaitu kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, kebijakan yang memberikan manfaat signifikan bagi kemajuan Kabupaten Gayo Lues, karakteristik lembaga penguasa, dan kepatuhan dan daya tanggap. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Gayo Lues yaitu derajat perubahan yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat diraih dalam waktu yang singkat, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang dilibatkan sangat minim, serta kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor terlibat memiliki komitmen yang rendah untuk memajukan sektor pariwisata.

Kebijakan Pengembangan Pariwisata tidak cukup hanya berupa qanun/peraturan daerah. Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan dibutuhkan turunan yang bersifat teknis dengan derajat perubahan yang lebih terjangkau sehingga lebih mudah direalisasikan. Selain itu, untuk meminimalisir jarak antara pembuat kebijakan dan target kebijakan maka dibutuhkan kebijakan dalam ruang lingkup yang lebih kecil seperti Peraturan Desa dan peraturan di objek-objek wisata. Pelaksana program di instansi terkait perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Instansi terkait juga harus merekrut tenaga profesional di bidang pariwisata. Sumber Daya yang dilibatkan harus lebih ditingkatkan secara optimal dan profesional. Hal ini dapat diwujudkan melalui investasi dan pelibatan sektor swasta secara langsung. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata membutuhkan strategi, komitmen dan kesungguhan dari seluruh aktor yang terlibat. Dengan komitmen dan kesungguhan, semua hambatan akan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Avenzora, R. (2008). Politik dan Kebijakan Wisata Alam Suatu Kebutuhan yang

- Terabaikan. *Ekoturisme-Teori Dan Praktek*, 279.
- Diarta, I. G. P. dan I. K. S. (2020). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. C.V Andi Offset.
- Hardani, A., H., U., J., U., E.F., I., R.R., R. A. F., & D.J., et al. (2020). *Metode Penelitian ualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Purwowibowo. (2012). *Pariwisata dan Prospek Ekowisata di Karesidenan Besuki. Makalah Seminar Pariwisata, 4*.
- Riant, N. . (2006). *Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi Dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Subarsono, A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwitri, S., Hartuti, P., & Kismatini. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusantara Creative.
- Yoeti, O. A. (2014). *Pemasaran Pariwisata*. Angkasa.